

ABSTRAK

Pemerintah bertanggung jawab mendukung perlindungan anak dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat optimal dan terarah. Sama halnya dengan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang harus dilakukan secara konsisten khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat yang sama-sama mempunyai kewajiban dalam hal menanggungi kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini, berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak) ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak dan mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN Dmk telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana Pencabulan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN Dmk lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seharusnya terdakwa mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Anak, Pencabulan, Tindak Pidana

ABSTRACT

The government is responsible for supporting child protection by providing facilities and accessibility for children so that their growth and development can be optimal and directed. Similar to efforts to tackle crimes of sexual violence against children, which must be done consistently, especially law enforcement officials and the community who have the same obligation in dealing with sexual crimes against children. This study, entitled Juridical Review of Crimes against Children (Case Study in the Demak District Court) aims to determine the application of the Criminal Law against the Rape Acts of Children in the Demak District Court and know the Judges' Considerations in Deciding the Rape Crimes against Children in the District Court Demak

The research method uses the legal research method with a normative juridical approach that is using the concept of positivist legis. This concept views the law as identical with written norms created and promulgated by authorized institutions or officials. This concept views the law as a normative system that is independent, closed and independent of real community life. This method examines written law with various aspects such as theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanations and explanations in each article, formalities and binding forces on a law.

Based on the results of the study it can be concluded that the application of the Criminal Law Against Rape Crime Against Children Number 230 / Pid.Sus / 2018 / PN Dmk has been appropriate because it has fulfilled the elements contained in Article 82 paragraph (1) Jo Article 76 E Law No . 35 of 2014 concerning Child Protection, and during the examination at the trial it was not found the reasons for the elimination of criminal liability both justification and excuse reasons, so that the defendant was declared capable of being responsible and had to receive appropriate sanctions for his actions. Legal considerations by the judge in imposing a criminal act on rape of a child in the case of decision number: Number 230 / Pid.Sus / 2018 / PN Jo Article 76 E Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, the defendant should receive the appropriate punishment stipulated in the article but due to various considerations of the judge to provide an opportunity for the defendant to be able to better themselves so that later do not repeat acts that violate the law.

Keywords: Child, Sexual Abuse, Crime